

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan budaya, suku, dan agama yang beragam. Berdasar pada berbagai latar belakang yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia inilah kemudian muncul pola pikir yang berbeda-beda pada setiap individu, dan hal ini pula yang mempengaruhi tingkah laku pada individu tersebut. Indonesia sebagai bangsa dan negara yang masih berumur muda dengan etnisitas dan subkultur yang beragam, agama yang plural, adat istiadat yang berbeda, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih menimbulkan kerentanan sehingga dapat dikatakan belum matang secara kultural.¹

Berkenaan dengan keragaman yang ada di Indonesia tentu tidak mudah mengurus keberadaan bangsa dan negara ini. Tanpa diimbangi dengan adanya jiwa spiritual yang tinggi dan saling memahami antar sesama agaknya toleransi di Indonesia masih memerlukan perhatian secara khusus, dengan berada di bawah kepemimpinan yang jauh berwawasan kedepan untuk masa depan Indonesia yang lebih berdaulat, bermartabat, dan adil. Seperti halnya yang akan penulis uraikan lebih lanjut dalam kajian ini.

Indonesia sebagai negara dengan identitas mayoritas masyarakat muslimnya yang besar masih menjadi persoalan yang layak untuk dibicarakan. Identitas yang mengarah pada jati diri individu, ciri khusus, simbol, kelompok atau bahkan negara ini masih terus menjadi persoalan.² Problem mengenai konsep-konsep ke-Islaman, kebinekaan, dan nasionalisme sering berhadapan satu sama lain. Dalam kajian Masdar Hilmy konsep seperti ini sering disebut dengan sentrifugalisme Islam, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dijadikan sebagai alasan utama untuk mengganti identitas Indonesia yang sebelumnya sudah berdiri dengan beragam agama menjadi negara yang berlandaskan kaidah-kaidah agama Islam.³

¹ Ahmad Syafi'i Maarif, *Menimbang Kembali KeIndonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan dan Toleransi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 20.

² Joanna Anneke W A Rummens, *Personal Identity and Social Structure in Saint Martin: A Plural Identities Approach*, (Kanada: York University, 2013), 157.

³ Masdar Hilmy, *Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6, No. 1, 2014, 1-13.

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap konsep-konsep pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, pemikiran para ulama, serta fakta kontekstual. Siti Ruhaini Dzuhayatin sendiri adalah sebagai pakar dan aktivis Islam, demokrasi, isu HAM, khususnya kesetaraan gender. Selain mengajar di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga terlibat dalam banyak gerakan sosial seperti memprakarsai terbentuknya Rifka Annisa *Women's Crisis Center* di Yogyakarta, dan menjabat sebagai ketua pengurus. Beliau pernah menjadi Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) UIN Sunan Kalijaga periode 2015-2019, dan sebelumnya adalah Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga. Saat ini beliau menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dengan masa tugas 2020-2024.⁴

Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam merespon masalah ini beliau menggunakan tiga rujukan atau landasan yaitu landasan normatif dari Al-Qur'an dan Hadist, pemikiran para ulama, dan juga fakta kontekstual yang ada, dan dengan konsisten beliau menerapkan landasan-landasan tersebut tanpa berpihak kepada salah satu kalangan dalam membahas isu ini, sebab pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan beragam identitas agama di dalamnya. Hal ini juga merupakan salah satu point penting yang akan diuraikan dalam kajian ini, dikarenakan untuk memberikan pemisahan antara pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin dengan pemikiran tokoh lain yang sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan, akan tetapi malah mendesak negara supaya mengusung konsep negara Islam, hal ini tentu sangat berbeda.

Islam yang merupakan agama juga sekaligus bertindak sebagai pandangan kehidupan (*way of life*), yaitu sistem (*siyazah*) yang memadukan ibadah dan politik.⁵ Karena dalam kehidupan manusia, perannya tidak hanya memberi petunjuk, tetapi juga mempengaruhi serta menerapkan semua ajarannya ke semua aspek kehidupan manusia. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik, penindasan, pertumpahan darah dan perang, yang pada akhirnya berujung pada kehancuran kehidupan masyarakat, oleh

⁴ UGM Press, Siti Ruhaini Dzuhayatin, <http://ugmpress.ugm.ac.id/id/writer/detail/siti-ruhaini-dzuhayatin>, diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

karena itu agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan lancar, damai, tertib, dan teratur diperlukan seorang pemimpin yang dapat mencapai semua kepentingan serta menghindarkan berbagai kerusakan.⁶

Tanpa pemimpin yang dapat melindungi dan menjamin keamanan agama, akan sulit bagi umat Islam untuk hidup dengan aturan Islam. Inilah sebabnya mengapa kepemimpinan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar, bahkan dianggap sebagai kewajiban.⁷ Mahmud Abdul Al-Majid Al-Khalidi menjelaskan bahwa melaksanakan kepemimpinan merupakan kewajiban agama dan bagian dari kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab agama tidak akan tegak tanpa kepemimpinan, serta taat kepada pemimpin juga merupakan perintah Allah SWT.⁸ Maka keluarlah pernyataan Imam Al-Ghazali, bahwa agama merupakan prinsip dan kekuasaan berarti penjaga, maka yang tidak memiliki prinsip akan hancur, dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Oleh karena itu, dalam Islam diperintahkan untuk menentukan pemimpin yang memahami keadaan dan ajaran yang diyakini umat Muslim. Maka, akibatnya pemimpin umat Islam itu harus berada diantara umat Islam itu sendiri, sebab apabila pemimpin tersebut berasal dari kalangan umat Islam otomatis akan melaksanakan hukum-hukum Islam.⁹

Muhammad Iqbal menjelaskan jika dalam kepemimpinan Islam, fungsi politik dan agama tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Jadi, pemimpin harus mengerjakan tugasnya mengurus urusan duniawi umat dan menjalankan agama serta syariat itu sendiri. Inilah kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para Khalifah Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan yang menghalangi non-Muslim untuk mengambil alih kepemimpinan umat Islam dalam sudut pandang fikih klasik. *Pertama*, karena non-Muslim tidak percaya akan adanya ajaran Islam, maka ditakutkan ketika mereka berkuasa akan bertindak

⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 15.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 59.

⁸ Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, *Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar, 2013), Terj. Harits Abu Ulya, cet. 1, 410.

⁹ Mahmud Abdul Majid Al-Khalidi, *Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam*, (Bogor: Al-Azhar, 2013), Terj. Harits Abu Ulya, cet. 1, 411.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

semena-mena terhadap umat M, misalnya umat Islam akan diusir dari tanah airnya, seperti halnya dulu ketika Rasulullah diusir dari Makkah oleh kaum non-Muslim, yang tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 1, yaitu:

يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

Artinya: “Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu.”¹¹

Kedua, non-Muslim kerap mempermainkan dan mencemooh agama Islam, karena dikhawatirkan hal itu terjadi, maka umat Islam tidak diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim, seperti yang termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 57, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan.”¹²

Ketiga, non-Muslim senang melihat kehidupan umat Islam dalam kesusahan, serta di hati dan mulut mereka yang menyimpan kedengkian terhadap umat Islam akan terus-menerus menyebabkan kemudharatan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 118 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat.”¹³

Keempat, ketika berhasil menjadi pemimpin atau penguasa, non-muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam dan akan lebih memihak kepada kepentingan mereka sendiri,

¹¹ Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 438.

¹² Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 93.

¹³ Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 51.

sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 8 sebagai berikut:

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ

Artinya: “Bagaimana mungkin (ada perjanjian demikian), padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak.”¹⁴

Kelima, ketika non-Muslim berkuasa dikhawatirkan mereka akan mendesak umat Islam untuk murtad, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Imran ayat 100, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كُفْرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.”¹⁵

Maka, berdasarkan ayat-ayat di atas dalam perspektif fikih klasik bisa dibilang jika non-Muslim tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin umat Islam.¹⁶

Menjabatnya Basuki Tjahya Purnama sebagai wakil gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan ketika ia menggantikan Joko Widodo menjadi gubernur karena terpilihnya Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014 menuai banyak kontroversi hingga penolakan terhadap kepemimpinan Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Penolakan terhadap kepemimpinan Ahok memuncak ketika terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan posisi gubernur digantikan oleh Ahok. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2017, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada tersebut, DKI Jakarta telah menjadi daerah kontroversial dengan adanya calon non-Muslim,

¹⁴ Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 150.

¹⁵ Al-Qur’an, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahnya*, 49.

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 71.

yaitu Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang mencalonkan diri sebagai pemimpin.¹⁷ Meskipun pada awal umat Islam mengetahui jika wakil gubernur DKI Jakarta adalah non-Muslim, sebagian dari mereka menolak, tapi aksi tersebut tidak terlalu besar. Bentuk penolakan ini dimulai dari bisik-bisik antar individu hingga bersifat terbuka.¹⁸ Tidak hanya Front Pembela Islam (FPI) saja yang menentang keras sejak Ahok menjadi wakil gubernur, tapi juga kelompok-kelompok Islam utama, seperti Sekretaris Jendral MUI, perwakilan Nahdhatul Ulama Jakarta Selatan, Ketua Forum Betawi Bersatu, dan Ketua Habib Muda Jakarta. Mereka berpendapat bahwa Ahok memiliki kebijakan menghancurkan umat Islam dengan melelang jabatan, membatasi kegiatan syi'ar Islam karena alasan macet, sampai larangan menyembelih kurban disekolah negeri dan masjid seperti yang disinyalir oleh media-media Islam online.¹⁹

Penolakan yang sudah berlangsung lama ini diperkuat dengan tersebarnya “transkrip” pidato dan video Ahok pada 27 September 2016 saat di Kepulauan Seribu, yang salah satu isinya diyakini menyinggung agama Islam. Kemudian pada 11 Oktober 2016, MUI menyampaikan pendapat dan sikap keagamaannya terkait penistaan agama, penghinaan ulama dan menghina Al-Qur'an yang dilakukan Ahok, termasuk menyatakan jika pernyataan Gubernur DKI Jakarta tergolong menghina Al-Qur'an dan atau ulama, yang mempunyai konsekuensi hukum. Setelah fatwa itu dikeluarkan, muncul Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan menjadi kendaraan Aksi Bela Islam.²⁰

Nama Susan Jasmin Zulkifli juga pernah menjadi sorotan publik karena diangkat sebagai lurah di Lenteng Agung yang kemudian ditolak oleh masyarakat dengan mayoritas muslim, sedangkan Lurah Susan merupakan non-Muslim. Berbeda dengan Kepala Desa Hj. Halijah Marding, seorang Muslim yang terpilih secara demokratis disuatu desa di Minahasa. Halijah dipilih dalam

¹⁷ Muhammad Wahyudi, *Kepemimpinan Non-Muslim: Studi Perbandingan atas Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah*, dalam Minoritas dalam Pandangan Syariah dan HAM: Narasi Kaum Muda Muslim, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 93.

¹⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 302.

¹⁹ Voa Islam, *16 Alasan Umat Islam Menolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta*, <http://m.voa-islam.com/news/liberalism/2014/09/26/33036/16-alasan-umat-islam-menolak-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/>, 26 September 2014, diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

²⁰ Ahmad Najib Burhani, *Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*, dalam Jurnal Maarif Institute Vol. 2, No. 2, 2016, 18.

dua periode oleh masyarakat yang mayoritas beragama Kristen, dan mengherankannya, keluarga beliau adalah satu-satunya keluarga Muslim di desa itu. Suaminya yang berprofesi sebagai petani biasa tidak mungkin bisa membeli jabatan melalui “*money politik*”. Namun, berita ini tidak menarik lebih banyak perhatian media.²¹ Berbanding terbalik dengan penolakan terhadap Lurah Susan yang menjadi perdebatan dan polemik yang kontraproduktif, hal ini sampai memicu emosi Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai atasan Lurah Susan. Maka, Ahok yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta menantang warga DKI untuk mengumpulkan tanda tangan menolak dirinya dan Lurah Susan yang sama-sama non-Muslim.²²

Diskursus tentang kepemimpinan non-Muslim memang merupakan salah satu hal yang kontroversial dalam Islam. Pembahasan mengenai kepemimpinan non-Muslim ini tidak hanya terjadi di masa sekarang ini, banyak ulama-ulama dan intelektual Muslim yang sudah lama melibatkan diri untuk melakukan pembahasan tentang boleh atau tidaknya seorang non-Muslim memimpin umat Islam. Meskipun semua keterangan bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist, tetap saja masih terjadi pro dan kontra. Hal ini tentu saja dapat terjadi karena dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan serta pemahaman mereka yang berbeda terhadap nash-nash agama dan kondisi sosial-politik yang berkembang.

Sentimen non-Muslim belakangan ini juga mulai bergejelok ditengah pusaran kekuasaan. Dampaknya, sejumlah kalangan umat Islam secara tegas menolak kepemimpinan non-Muslim. Akan tetapi, penolakan ini justru langsung mengundang reaksi kontra dari kalangan yang juga berasal dari umat Islam. Kalangan yang kontra tersebut lebih memilih posisi yang bersebrangan dengan mendukung pemimpin non-Muslim, asalkan terpilih melalui mekanisme pemilu yang sah dan adil. Sikap dari masing-masing kalangan umat Islam ini, terlepas dari benar atau tidaknya tentu memiliki landasan argumen dan dalil tersendiri.²³

Berdasarkan kasus di atas, maka penting untuk dikaji lebih dalam mengenai kepemimpinan non-Muslim. Terkait apakah boleh

²¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia*, dalam Fikih Kebinekaan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 302.

²² Liputan6, *Kontroversi Lurah Cantik Susan*, <http://news.liputan6.com/read/678504/>, 30 Agustus 2013, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

²³ Muhsin Labib, *Pemimpin Non-Muslim: Siapa Pro, Siapa Kontra*, (Jakarta, Alinea, 2014), 32.

seorang non-Muslim menjabat sebagai pemimpin di suatu negara atau daerah dengan mayoritas masyarakat Muslim di dalamnya, banyak sekali pertanyaan mengenai hal ini. Contoh kasus kepemimpinan Basuki Tjahya Purnama, seorang non-Muslim yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Lurah Susan yang ditolak oleh warganya karena non-Muslim, mengakibatkan munculnya pemikiran dikalangan masyarakat muslim Indonesia terkait bagaimana dengan kepemimpinan seorang yang beragama selain Islam.

Adanya beberapa kasus kontroversi pro dan kontra terhadap kepemimpinan non-Muslim di Indonesia sebagaimana paparan latar belakang di atas, sehingga menjadi dasar dari penulis untuk melakukan kajian dengan judul “**Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia (Studi Pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin)**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang pemikiran politik Siti Ruhaini Dzhayatin, khususnya ingin mendiskusikan mengenai bagaimana pandangan beliau mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia, kemudian pro dan kontra kepemimpinan non-Muslim, serta bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam tinjauan Al-Qur'an dan Hadits. Pembahasan yang akan penulis kaji hanya mencakup tiga hal tersebut, dalam perspektif Siti Ruhaini Dzhayatin ini fokus penelitiannya terdapat pada tulisan beliau dalam buku “Fikih Kebinekaan: Islam, Kepemimpinan Non-Muslim dan Hak Asasi Manusia”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pro dan kontra kepemimpinan non-Muslim di Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia?
3. Apa faktor yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari mengapa kajian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pro dan kontra kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.

2. Mengetahui pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana serta mengembangkan akan khasanah ilmu pengetahuan terutama mengenai persoalan kepemimpinan non-Muslim.
 - b. Diharapkan dapat berguna dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana Indonesia menghadapi tantangan kemajuan yang ada dalam negara.
 - c. Mampu dijadikan bahan bacaan dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- ##### **2. Manfaat praktis**

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan pemerintah sebagai informasi, pedoman, dan rujukan terhadap masalah kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi yang akan penulis susun terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan. Hal ini dilakukan agar dalam penulisan tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan oleh penulis sebelumnya. Adapun pembagian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari sampul.

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari tiga bab, yang mana antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengapa kajian ini di tulis, yang meliputi latar belakang masalah, fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka teori

Bab ini berisi tentang deskripsi dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang di kaji. Kerangka teori memaparkan tentang teori kepemimpinan. Selain itu bab ini juga berisi tentang hasil dari penelitian terdahulu yang berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

BAB III: Metode penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian. Kemudian berisi subyek penelitian yang menjadi sumber utama diperolehnya data dalam kajian ini. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai deskripsi data dan analisis data tentang pemikiran Siti Ruhaini Dzuhayatin terkait kepemimpinan non-Muslim di Indonesia.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil kajian penulis, dan dilanjutkan dengan saran-saran yang penulis tawarkan dalam menyelesaikan masalah dalam kajiannya.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan kajian dan memecahkan masalah, juga berisi lapiran-lapiran dari dokumen yang relevan dengan masalah kajian.